

dikategorikan sebagai *stakeholder* sekunder seperti: kelompok-kelompok kritis demi tujuan kemajuan pendidikan, organisasi profesional (PGRI, KNPI dan sebagainya), LSM, MUI organisasi sosial (NU, Muhammadiyah) dan berbagai organisasi profesional dan organisasi sosial masyarakat lainnya.

3. Temuan peneliti tentang respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep mengingatkan peneliti pada adagium '*bhuppa' bhabhu' guru rato*' memiliki relevansi dengan teori relasi. Secara hierarkial pada figur-figur utama. Orang Madura pertama-tama harus patuh dan taat kepada kedua orang tua (*nya*), kemudian para *ghuru* (ulama/kiai), atau elite pesantren dan yang terakhir pada *rato* (pemimpin formal atau biasa disebut birokrasi). Artinya, dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standar referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkial. Sebagai aturan formatif yang mengikat setiap orang Madura maka pelanggaran atau paling-tidak melalaikan aturan itu akan mendapatkan sanksi sosial sekaligus sanksi kultural.

Respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep dari hasil penelitian ini masyarakat melihat kebijakan pendidikan Kabupaten Sumenep terjadi pro-kontra sebagian setuju dan mengharapkan agar tetap dipimpin oleh tokoh elite pesantren ketimbang dipimpin oleh orang yang tidak jelas dan hanya akan mengeruk kekayaan Sumenep dan tidak berpihak pendidikan pesantren, hal ini

nampak mulai sejak reformasi bergulir, para tokoh elite pesantren di Sumenep berada di wilayah birokrasi baik Eksekutif atau legislatif. Karena secara umum Sumenep lembaga pendidikan yang ada adalah mayoritas lembaga pendidikan berbasis pesantren dan butuh *grand desain* inovasi pendidikan yang lebih kreatif, dan tak cukup dengan dibuktikan bahwa APBD Sumenep menjadi salah satu kabupaten yang punya keberpihakan terhadap pendidikan swasta. Bahkan APBD Sumenep mendapat penghargaan dari propinsi Jawa Timur.

Adapun pihak yang kontra mengharapkan agar elite pesantren kembali pada pesantren, jangan sampai semua elite pesantren menjadi pemimpin pemangku kebijakan harus ada tokoh yang tetap eksis mengelola pesantren, elite pesantren lebih baik mengutus dan mendukung orang yang dipercaya untuk menduduki legislatif atau eksekutif sehingga elite pesantren dapat menjadi kontrol ketika ada kebijakan yang menyimpang.

Respons masyarakat tentang implementasi kebijakan pendidikan ini adalah bagaimana pesantren harus tetap menjaga agar citra pondok pesantren di mata masyarakat sesuai harapan masyarakat luas. Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional dan santrinya pun merupakan bagian integral dari masyarakat. Para santri hendaknya dipersiapkan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Pesantren hendaknya terbuka pada perkembangan dan perubahan yang terjadi, termasuk temuan-temuan ilmiah dalam dunia pendidikan, pesantren tidak

semestinya tenggelam pada dunianya sendiri. Terakhir, pesantren juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi pendidikan agama Islam (laboratorium agama).

Maka sebagai sebuah temuan tentang respons dari masyarakat tentang implementasi kebijakan pendidikan merupakan sebuah rumusan kebijakan yang tampaknya sangat tergantung pada seberapa besar pemahaman pengambil atau pemangku kebijakan tersebut terhadap pendidikan. Oleh karena itu, biasanya para pengambil kebijakan selalu memiliki staf-staf khusus yang berfungsi sebagai staf ahli, agar segala kebijakan yang diambil tidak keliru. Bahkan semestinya sebelum kebijakan dikeluarkan, maksud dari kebijakan umum untuk memperoleh berbagai masukan, termasuk misalnya perlu diseminarkan, lokakarya, temu ilmiah, dan sebagainya. Tanpa adanya sosialisasi yang baik, sebuah kebijakan akan sangat sulit diterapkan, dan mungkin saja akan berhadapan dengan banyak masalah.

Respons yang berkembang di masyarakat juga ada yang mengapresiasi tentang tampunya kiai dalam kancah politik praktis yang berargumentasi Sumenep harus di kelola untuk kesejahteraan Sumenep, bukan pihak korporasi yang lebih menguntungkan pribadi dan kelompok. Adapula memberi catatan kritis lebih baik kiai mengayomi umat dan masyarakat serta memberdayakan secara baik, agar kepercayaan tentang kiai dan pesantren tetap tidak goyah dalam masyarakat. Respons berikutnya tidak masalah dengan catatan kiai yang tampil dan aktif di gelanggang politik

praktis ada pengganti yang bisa memimpin pesantren yang dia asuh, agar kepemimpinan pesantren dan berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam berjalan dan terjadi regenerasi kepemimpinan.

Kiai sebagai elite pesantren maupun pemerintah mempunyai hubungan erat dengan masyarakat mereka menggunakan kekuasaan yang dimiliki saling tawar menawar demi mendapat keuntungan. Perspektif pemerintah kekuasaan kiai cukup kuat mengakar di masyarakat dan dapat mempengaruhi tindakan sosial masyarakat. Hal ini terjadi, karena posisi pemerintah butuh kuasa dari legitimator keagamaan elite pesantren dalam melakukan kebijakan dalam berbagai kehidupan termasuk bidang pendidikan. Selain itu, juga memerlukan legitimasi kiai sebagai elite pesantren atas kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan pendidikan dan berbagai masalah ke-agama-an.

B. Implikasi Teoritik

Relasi elit pesantren dan politik menjadi semakin koheren ketika dihubungkan dengan kebijakan pendidikan yang bertujuan dan berusaha mencari pemusatan kebijakan sebagai alternatif dengan tujuan membuka peluang bagi munculnya kebijakan terbaik. Penelitian tentang relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan di Sumenep. Posisi para elite pesantren dan pemangku kebijakan lebih bersifat subjek dan informan aktif hal yang diharapkan harus lebih fokus dengan mendahulukan aspirasi dan respons masyarakat yang ending-nya adalah kemalsahatan umum masyarakat yang

